



Ironi Sawit Indonesia: Melimpah tetapi Tak Berdaulat Harga

Meskipun Indonesia menyumbang hampir 60% produksi sawit dunia dan menjadi produsen terbesar, ironisnya Indonesia belum mampu menjadi penentu harga (*price maker*) di pasar global. Kegagalan dalam membangun Bursa Fisik CPO yang efektif, minimnya infrastruktur pendukung, kurangnya standarisasi kualitas, hingga absennya kemitraan strategis dengan bursa internasional membuat Indonesia tertinggal dari Malaysia yang justru lebih dominan dalam penentuan harga, meski produksinya lebih kecil. Hal ini memperlihatkan bahwa dominasi bukan semata soal jumlah, melainkan kekuatan dalam sistem tata niaga dan regulasi. Jika begitu, mampukah Indonesia bertransformasi dari sekadar eksportir menjadi pengendali pasar global?

**Selengkapnya di halaman 2*

Tarif Trump Apakah Berdampak Pada Industri Sawit?

Di tengah tekanan global akibat tarif impor 32% dari Amerika Serikat terhadap produk turunan sawit Indonesia, yang padahal masih lebih murah dibanding pesaing seperti Malaysia dan Kolombia—tantangan terbesar industri sawit justru datang dari dalam negeri. Keterbatasan anggaran BPDP dalam mendanai program strategis seperti biodiesel dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menimbulkan risiko defisit, terutama di tengah naiknya biaya subsidi dan target ambisius peremajaan lahan. Untuk mengatasinya, dibutuhkan diplomasi perdagangan yang kuat, efisiensi anggaran, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar industri sawit tetap kompetitif dan berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian ini, mampukah Indonesia menyulap tekanan global menjadi momentum reformasi industri sawit nasional?

**Selengkapnya di halaman 7*

Dilema Pungutan Ekspor terhadap Pengembangan Energi Hijau

Kebijakan baru pemerintah melalui PMK No. 30 Tahun 2025 yang menaikkan tarif pungutan ekspor sawit hingga 10%, termasuk untuk produk limbah seperti UCO dan POME, menuai kontroversi. Meski bertujuan memperkuat pendanaan BPDP untuk program strategis seperti biodiesel dan PSR, penyamarataan tarif ini justru mengancam pengembangan energi hijau berbasis limbah yang berpotensi besar menekan emisi karbon. Alih-alih mendorong inovasi dan insentif ramah lingkungan, kebijakan ini memperberat beban eksportir limbah dan berpotensi mematikan ekosistem energi terbarukan yang tengah tumbuh. Jika solusi seperti sistem *traceability* digital belum diterapkan, apakah Indonesia siap kehilangan peluang emas menjadi pelopor energi hijau dari limbah sawit?

**Selengkapnya di halaman 11*



Dr. Sofyan A. Djalil

Editorial

Industri sawit Indonesia kembali menghadapi tantangan global, termasuk tarif impor dari Pemerintahan Trump yang berdampak pada ekspor. Di sisi lain, peluang hadir lewat pengembangan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) dan tingginya permintaan *Used Cooking Oil* (UCO). Namun, regulasi dalam negeri seperti penyamarataan tarif ekspor antara limbah dan CPO justru menghambat potensi ini. Sinergi kebijakan dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan. Selamat membaca IPOSS News Edisi Kesepuluh!

Ironi sawit Indonesia: Melimpah Tapi Tak Berdaulat Harga

Banyak tidak selalu berarti kuat, sementara sedikit tetap bisa dominan manakala didukung oleh infrastruktur dan sistem yang memadai. Begitulah gambaran posisi Indonesia dalam kancah persawitan global.

Meskipun Indonesia telah lama dikenal sebagai produsen kelapa sawit terbesar, namun nyatanya belum memiliki posisi dominan. Ya, Indonesia tidak memiliki kendali atas harga sawit pasar global. Tentu fenomena ini menimbulkan pertanyaan: mengapa negara dengan produksi melimpah, tidak dapat menentukan harga komoditas yang menjadi andalannya?

Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Indonesia memproduksi sekitar 50 juta ton minyak sawit mentah (CPO) per tahunnya. Ini sudah lebih dari 50% dari total produksi global. Data ini juga didukung oleh data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2024, di mana Indonesia menyumbang hampir 59% produksi sawit, disusul oleh Malaysia di urutan kedua dengan 24% dan negara lainnya hanya menyumbang 17%. Sebagian besar produksi ini diekspor ke berbagai negara, seperti India, Tiongkok, dan negara-negara lainnya.

Adapun faktor yang mempengaruhi ketidakpemilikan Indonesia dalam mengendalikan harga sawit global, antara lain, kegagalan dalam mengelola Bursa Fisik CPO. Fakta menarik muncul ketika kita menengok kembali ke Oktober 2023, di mana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah meresmikan **Bursa Fisik CPO Indonesia** yang dikelola oleh ICDX, dengan tujuan menciptakan harga referensi yang lebih transparan dan mengurangi ketergantungan pada harga internasional dari Bursa Derivatif Malaysia (MDEX) dan Rotterdam.

Sayangnya, ternyata bursa ini tidak mendapatkan dukungan penuh dari pelaku pasar karena setelah peresmian disahkan, aktivitas perdagangan fisik nyaris tidak berlanjut, menunjukkan minimnya kepercayaan dan partisipasi pelaku usaha terhadap platform tersebut.

Dalam analisa IPOSS, kegagalan ini dipicu oleh sejumlah faktor struktural dan teknis, seperti kurang fleksibelnya instrumen

perdagangan, ketiadaan infrastruktur penyimpanan, ketidakstandarisasian kualitas CPO, serta belum adanya kemitraan strategis dengan bursa internasional. Selain itu, mekanisme kliring dan transparansi harga juga dianggap belum memadai.

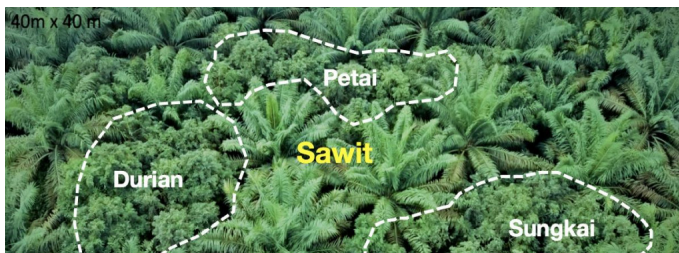
Dibandingkan Bursa Malaysia yang telah menerapkan instrumen perdagangan seperti opsi (*options*) untuk meningkatkan fleksibilitas dan likuiditas, bursa Indonesia masih tertinggal dari segi desain pasar dan regulasi pendukung. Faktor lainnya adalah keterbatasan hilirisasi industri dan masihnya ketergantungan Indonesia terhadap ekspor yang membuatnya rentan dan mudah dipengaruhi fluktuasi harga internasional dan kebijakan negara importir.

Dengan berbagai kelemahan diatas, harga CPO akhirnya acap kali ditentukan oleh bursa komoditas internasional, seperti Bursa Malaysia Derivatif (MDEX) dan Rotterdam (Belanda). Perbedaan yang dapat kita lihat antara Indonesia dan kedua negara tersebut adalah Indonesia selama ini lebih menekankan pada sisi **produksi dan volume ekspor**, bukan pada penguatan infrastruktur pasar dan tata niaganya. Sedangkan Malaysia yang produksi sawitnya lebih kecil dari Indonesia, justru memiliki **pengaruh lebih besar dalam pembentukan harga**, berkat peran MDEX dan strategi hilirisasi yang lebih matang.

Sebagai produsen sawit terbesar, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk memimpin pasar global. Namun, tanpa reformasi menyeluruh pada tata niaga dan adanya dukungan kepastian hukum, upaya Indonesia untuk menjadi *price maker* CPO berpotensi kembali stagnan. Melalui pengembangan industri hilir, diversifikasi pasar, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan peningkatan daya saing produk, Indonesia dapat mengubah posisi dari sekadar produsen menjadi pemimpin pasar yang memiliki kendali harga.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia tidak hanya akan memperkuat posisi ekonominya, tetapi juga memastikan kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri sawit di masa depan. (JH)

Agroforestri Sawit, Bisakah jadi Solusi Monokultur?



Kritik tajam terhadap industri sawit utamanya karena dianggap tidak ramah lingkungan, alias tidak memenuhi unsur sustainability. Sawit dianggap sebagai pohon monokultur, susah berdampingan dengan tumbuhan lainnya. Tapi benarkah demikian? Kini banyak pihak ingin membuktikan sebaliknya.

Sejak Prabowo terpilih sebagai Presiden Indonesia, salah satu yang digagas adalah kemandirian pangan yang antara lain dengan cara menciptakan tumpangsari pada lahan sawit. Padi gogo dipilih menjadi tumbuhan penyalia dengan harapan bahwa selama tiga tahun pertama sejak replanting, petani masih tetap mendapatkan penghasilan yang cukup memadai. Hal ini (diatas kertas) tentunya sangat logis mengingat lahan sawit di Indonesia yang luasnya kini telah mencapai lebih dari 17 juta hektare itu, sebagian diantaranya pasti dalam proses peremajaan (replanting).

Tidak hanya itu. Bahkan kini ada pihak-pihak yang ingin menjadikan agroforestri sebagai cara untuk menghutankan lahan yang sudah dipenuhi oleh pohon-pohon sawit. Mereka berpendapat bahwa sawit pasti memiliki teman aneka pohon yang karakternya saling mendukung satu dengan lainnya (bukan saling mematikan). Setidaknya, sawit nantinya tidak dianggap monokultur yang lebih suka hidup sendirian tanpa teman.

Menurut harian Info Sawit (20/4), agroforestri menjadi salah satu pendekatan yang dinilai paling cocok untuk diterapkan oleh petani swadaya karena tidak hanya memperbaiki kondisi ekologis kebun, tetapi juga menjawab kebutuhan ekonomi harian mereka.

Agroforestri pada kebun sawit memadukan pohon sawit dengan tanaman lain dalam satu lahan secara terencana. Dengan sistem ini, kebun tidak lagi monoton, melainkan menjadi ruang tumbuh bagi berbagai jenis vegetasi yang saling mendukung. Agar agroforestri berhasil dan benar-benar membuat kebun sawit lebih berkelanjutan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.

Salah satu tantangan utama adalah seleksi vegetasi. Tidak semua tanaman bisa hidup berdampingan dengan sawit tanpa saling berebut nutrisi, cahaya, dan air. Oleh karena

itu, penting memilih tanaman pendamping yang bersifat sinergis atau bersimbiosis mutualisme. Salah satu contoh yang menjanjikan adalah tanaman pakis jenis *Nephrolepis biserrata*, yang dikenal membantu menjaga kelembapan tanah dan mendukung populasi mikroba baik di sekitarnya. Namun perlu diingat, jenis pakis seperti pakis udang justru dilaporkan dapat menjadi gulma yang agresif dan mengganggu pertumbuhan sawit. Oleh karena itu, seleksi jenis tanaman sangat krusial.

Selain jenis tanaman, jarak tanam atau penjarangan juga menentukan keberhasilan agroforestri. Idealnya, tanaman pendamping ditanam dalam jarak 2–3 meter dari pohon sawit di saat usia belum menghasilkan (0-2 tahun), agar masih dapat mendapatkan akses cahaya dan pertumbuhan akar. Misalnya, di kebun sawit swadaya di Rokan Hulu, petani menanam jagung sebagai tanaman sela dengan jarak tanam zigzag antar barisan, memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan tetap optimal. Jagung dipilih karena memiliki siklus panen yang cepat, akar dangkal, dan tidak bersaing langsung dengan sawit dalam jangka pendek.

Perawatan rutin juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ini termasuk pemangkasan daun, pengendalian gulma, serta rotasi tanaman musiman lain. Selain itu, penggunaan pupuk organik dari limbah tanaman atau kotoran ternak bisa menjadi cara alami untuk memperbaiki kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

Jika agroforestri dijalankan dengan benar, hasilnya tak hanya berupa kebun yang lebih hijau dan sehat. Petani juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari hasil tanaman pendamping. Jagung, pisang, bahkan tanaman obat seperti jahe dan kunyit, dapat dipanen dan dijual dalam waktu lebih singkat dibanding sawit. Hal ini membantu petani mengatasi fluktuasi harga sawit dan memenuhi kebutuhan ekonomi harian.

Lebih dari sekadar pendapatan tambahan, dampak ekonomi agroforestri juga terasa dalam jangka panjang. Kebun yang lebih beragam memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap hama, penyakit, dan iklim ekstrem. Dengan sistem ini, petani tak lagi bergantung pada satu jenis panen. Mereka lebih tangguh secara ekonomi dan ekologis.

Agroforestri memang bukan solusi instan, tetapi bila dijalankan dengan perencanaan matang dan pendampingan teknis yang memadai, sistem ini bisa menjadi tulang punggung masa depan sawit berkelanjutan di Indonesia. Bukan hanya menjaga hasil, tapi juga menjaga masa depan kebun dan petaninya. (JH)

Akhir Era Minyak Sawit Murah



Selama hampir dua dekade, minyak kelapa sawit menjadi bintang utama di pasar minyak nabati dunia. Daya tarik utamanya terletak pada efisiensi produksi dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan minyak nabati lainnya. Namun, situasi tersebut kini mulai berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, harga minyak sawit menunjukkan tren kenaikan dan tak lagi menjadi pilihan termurah di pasar global.

Salah satu faktor utama di balik perubahan ini adalah meningkatnya penggunaan minyak sawit untuk energi terbarukan. Di Indonesia misalnya, berdasarkan data dari Kementerian ESDM sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, tahun ini menerapkan campuran biodiesel B40 yakni campuran 40% minyak sawit yang memerlukan alokasi CPO sebesar 14,2 juta ton.

Program mandatori B40 ini menyerap sekitar 24% dari total produksi CPO nasional yang diperkirakan mencapai 50 juta ton. Dampaknya terasa langsung pada pasokan untuk ekspor. Data GAPKI memperkirakan, kebijakan ini akan menurunkan volume ekspor minyak sawit Indonesia dari 29,5 juta metrik ton pada 2024 menjadi hanya 20 juta metrik ton pada tahun 2030.

Kondisi serupa juga terlihat di pasar internasional. Mengutip laporan Reuters (10/3), di India harga CPO kini lebih mahal dibandingkan minyak kedelai mentah, dengan selisih yang bisa melebihi \$100 per ton. Padahal, pada akhir 2022, minyak sawit masih dijual dengan harga lebih murah hingga \$400 per ton dibandingkan minyak kedelai. Saat ini, harga CPO di India mencapai \$1.185 per ton, melonjak drastis dari harga di bawah \$500 pada tahun 2019.

Menurut Dorab Mistry, Direktur India Godrej International, era harga diskon besar-besaran untuk minyak sawit telah berakhir. Keunggulan harga yang dulu menjadi nilai jual utama kini mulai memudar. "Masa-masa diskon \$400 per ton sudah berlalu. Minyak kelapa sawit tidak akan semurah itu lagi selama Indonesia terus memprioritaskan biodiesel," ujarnya.

Selain terbatasnya alokasi untuk ekspor, produksi dalam negeri juga menunjukkan tren penurunan. Sepanjang tahun 2024, produksi CPO Indonesia hanya mencapai sekitar 48 juta ton, turun dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya yang sempat menembus angka 50 juta ton. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat peremajaan tanaman dan bertambahnya tanaman tidak produktif.

Di sisi lain, permintaan pasar, baik di dalam negeri maupun internasional, tetap tinggi. Mengutip Kompas.id (18/4), Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyebutkan bahwa permintaan minyak sawit dari negara-negara seperti Amerika Serikat masih sangat besar. Produk seperti margarin, misalnya, tidak dapat digantikan dengan minyak nabati lain karena dapat berdampak pada kesehatan. Bahkan, ada larangan penggunaan minyak nabati selain sawit dalam makanan tertentu di AS. Dengan kondisi tersebut, menurut Eddy meskipun ekspor mengalami tekanan, penurunan volume ekspor diperkirakan tidak akan terlalu besar, atau bisa saja stagnan.

Namun demikian, tetap dibutuhkan langkah konkret untuk menjaga agar pasar global tidak hilang begitu saja. Sebagai salah satu langkah strategis menghadapi berakhirnya era minyak sawit murah, Indonesia perlu memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit. Dengan mengolah CPO menjadi produk turunan bernilai tambah tinggi seperti oleokimia dan produk farmasi, Indonesia dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong industrialisasi dengan fokus pada pengembangan industri manufaktur berbasis inovasi. Transformasi ini penting untuk menghindari ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Dengan mengembangkan sektor industri yang berorientasi ekspor dan padat karya, Indonesia dapat meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. (AM)

Dampak Tarif Trump Terhadap Industri CPO Indonesia

Pada tahun 2025, Amerika Serikat memberlakukan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia, yang berdampak pada produk kelapa sawit, salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Amerika Serikat adalah pasar ekspor kelapa sawit Indonesia terbesar keempat dengan nilai mencapai USD 1,9 miliar pada tahun 2024. Produk turunan CPO seperti Palm Mid Fraction, RBD Palm Stearin, dan RBD Palm Olein, yang mendominasi 67,7% dari total ekspor sawit ke AS (HS 151190), termasuk yang dikenakan tarif tersebut. Produk ini digunakan dalam berbagai industri mulai dari makanan hingga kosmetik dan sabun. Sebelum diterapkannya tarif tersebut, nilai impor per ton produk turunan sawit asal Indonesia di AS jauh lebih murah dibandingkan negara pesaing terdekatnya seperti Malaysia dan Kolombia hingga 15%. Setelah diterapkannya tarif, nilai import per ton Indonesia pun masih tergolong lebih murah hingga 8%.

Selain potensi tekanan dari tarif AS, ekosistem industri kelapa sawit Indonesia, khususnya BPDP sebagai lembaga pendukung juga menghadapi tantangan krusial dalam mengelola keuangan untuk mencapai target program. Selain karena pungutan ekspor AS yang terancam, terdapat target yang tinggi khususnya untuk pendanaan program strategis seperti biodiesel dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Target peremajaan seluas 120.000 hektar dengan dana bantuan Rp 60 juta per hektar menyebabkan peningkatan anggaran hingga lima kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu, pembengkakan biaya subsidi biodiesel disebabkan karena melebarnya selisih harga antara biodiesel dan solar. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan dan strategi pembiayaan, potensi defisit anggaran mengancam keberlanjutan program.

Untuk menghadapi tantangan ini, BPDP perlu melakukan penyesuaian realistis dan strategis pada program pembiayaan dan kebijakan anggaran.

Diplomasi perdagangan yang intensif harus dijalankan untuk menjaga dan memperluas akses pasar ekspor. Optimalisasi alokasi anggaran dan penyesuaian program nasional perlu dilakukan agar dana terbatas bisa digunakan efisien. Penyesuaian target PSR menjadi lebih realistis tanpa mengurangi kualitas peremajaan sangat penting. Pembagian beban subsidi pada program biodiesel harus melibatkan pemerintah dan konsumen agar tidak sepenuhnya ditanggung BPDP, demi keseimbangan keuangan.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting. Pemerintah, pelaku industri, dan petani harus bersinergi dalam pengembangan teknologi inovatif, peningkatan produktivitas, dan penyesuaian kebijakan yang adaptif. Dengan koordinasi baik, industri sawit Indonesia dapat mempertahankan daya saing dan mengurangi risiko akibat perubahan iklim kebijakan perdagangan global dan kondisi pasar.

Perkembangan teknologi, seperti digitalisasi dan otomasi produksi serta distribusi, juga krusial untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Adopsi teknologi membantu pengelolaan sumber daya optimal, mengurangi biaya produksi, dan memenuhi standar internasional keberlanjutan dan meningkatkan kualitas produk, memperkuat posisi Indonesia di pasar global dan membuka peluang pasar baru.

Meski potensi tekanan tarif AS ada, tantangan utama industri sawit Indonesia adalah terkait keberlanjutan program BPDP. Keberhasilan mengatasi tantangan ini bergantung pada kemampuan BPDP dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah tepat dan kolaborasi kuat, industri kelapa sawit Indonesia dapat terus tumbuh dan berkontribusi bagi perekonomian nasional di tengah dinamika pasar global. (FGK)



Green Financing untuk UCO: Inisiatif Hijau bagi Masyarakat dan Industri

Minyak jelantah atau *Used Cooking Oil* (UCO) telah mulai diperdagangkan di sejumlah wilayah di Indonesia, melalui pembelian langsung maupun skema barter. Namun praktik ini masih terbatas, bersifat informal, dan belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Padahal, minyak jelantah menyimpan potensi ekonomi sebagai produk limbah rumah tangga yang bisa diolah kembali. Sayangnya, nilai tambah UCO belum dikelola secara maksimal karena belum ada aturan khusus di tingkat nasional yang mengatur tata niaga secara menyeluruh.

Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Belanda, Finlandia, dan AS telah menganggap UCO sebagai komoditas strategis. Melalui dukungan insentif berbasis lingkungan dan pembiayaan hijau, negara-negara tersebut berhasil membangun ekosistem ekonomi yang menghargai kontribusi lingkungan UCO dalam menurunkan emisi. UCO digunakan sebagai bahan baku bioenergi seperti biosolar dan bioavtur. Sebagai bahan baku generasi kedua, UCO memiliki tingkat emisi lebih rendah daripada minyak nabati.

Keunggulan negara maju dalam menyerap UCO tidak terlepas dari pendekatan sistemik berbasis insentif lingkungan dan pembiayaan transisi. Pertama, mereka menetapkan harga UCO berdasarkan kontribusi lingkungan. UCO yang diolah dengan teknologi konversi HEFA (*Hydroprocessed Esters and Fatty Acids*) dapat mengurangi karbon sekitar 84,4% dari 89 gCO₂e/MJ (gram karbon dioksida ekuivalen per megajoule energi) emisi bahan bakar jet konvensional (avtur). Ini setara dengan hanya menghasilkan total emisi sebesar 13,9 gCO₂e/MJ. Dengan emisi karbon yang dikeluarkan setiap pembakaran 1 liter avtur sebesar 2,5 kg CO₂e (4AIR, 2025), maka setiap 1 liter SAF dari UCO jika digunakan secara penuh dapat menghindari 84,4% x 2,5 kg CO₂e = 2,1 Kg CO₂e.

Setiap emisi yang dihemat akan dihargai hingga senilai USD 200/ton di EU-ETS (*European Union Emissions Trading System*) (ICAP, 2023). Artinya, setiap liter UCO yang digunakan di sektor energi memiliki nilai ekonomi tambahan. Karena itu, produsen SAF mampu membeli UCO dengan harga lebih tinggi tanpa mengorbankan margin.

Kedua, mereka membuka akses *green financing* bagi pelaku industri. Perusahaan seperti Neste memperoleh modal murah dari *green bonds* dan pinjaman hijau untuk membangun kilang dan memperluas pengumpulan UCO. Dengan biaya bunga rendah, mereka dapat membeli UCO dengan harga yang premium (European Investment Bank, 2022).



Ketiga, mereka menggunakan teknologi digital untuk mendata dan memberi insentif. Platform digital menjamin transparansi asal-usul (*traceability*) UCO, sekaligus menjadi media penyaluran insentif berbasis hasil.

Indonesia bisa belajar dari praktik tersebut. Menurut perhitungan IPOSS, dari data alokasi pangan GAPKI sebesar 10,3 juta ton CPO, dapat menghasilkan minyak goreng sebesar 8,2 juta ton. Dengan asumsi minyak jelantah yang dihasilkan adalah 40% dari minyak goreng, maka Indonesia berpotensi memiliki 3,3 juta ton UCO per tahun. Angka yang cukup besar, jauh melebihi kebutuhan bahan baku SAF domestik tahun 2030 (J2,5), sebesar 156 ribu kiloliter SAF, yang hanya membutuhkan sekitar 194 ribu ton UCO atau bahan baku lain.

Mengingat potensi ekonomi hijau dari pemanfaatan produk limbah ini, sudah saatnya mendorong tata niaga UCO dibenahi lebih baik lagi, terutama membangun ekosistem dari hilir ke hulu yang kokoh. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi akses terhadap insentif lingkungan dan pembiayaan hijau (*green financing*) yang diarahkan ke industri hilirisasi, yang membutuhkan investasi besar dan jangka panjang. Melalui mekanisme seperti IDXCarbon, insentif berbasis karbon dapat meningkatkan kelayakan ekonomi industri, disertai dengan dukungan fasilitas pendanaan dari lembaga internasional seperti IFC atau *Green Climate Fund*.

Ketika industri hilirisasi tumbuh dengan dukungan pembiayaan murah dan insentif berbasis emisi, permintaan terhadap UCO sebagai bahan baku akan meningkat. Kenaikan permintaan ini akan menciptakan pasar yang lebih kompetitif dan sehat bagi pengumpulan UCO. Dengan harga yang membaik secara wajar, rumah tangga, UMKM, dan pelaku informal terdorong ikut serta dalam rantai pasok secara lebih serius dan terstruktur.

Pengembangan digitalisasi rantai niaga UCO diperlukan untuk mendukung *traceability* produk—termasuk bagi pelaku informal—sehingga seluruh pihak dapat berpartisipasi secara adil dan berkelanjutan. (DS)

Tarif dan Taktik: Strategi Sawit Indonesia dalam Dunia yang Berubah Cepat

Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah dinamika global yang terus berkembang. Sebagai salah satu komoditas ekspor utama, sawit Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun kebijakan perdagangan internasional yang semakin kompleks menuntut strategi yang lebih resilien.

Pasar ekspor menjadi salah satu elemen kunci dalam keberlanjutan industri kelapa sawit. Salah satu pasar utama bagi produk sawit Indonesia adalah Amerika Serikat (AS), yang tercatat sebagai pasar ekspor keempat terbesar. AS menyerap sekitar 1,9 juta ton sawit senilai USD 1,9 miliar, di mana lebih dari dua pertiganya, atau sekitar 67,7%, berasal dari produk turunan seperti *palm mid fraction*, RBD *palm stearin*, dan RBD *palm olein*, yang digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan produk rumah tangga.

Sejak pemberlakuan tarif tambahan hingga 32% untuk produk tertentu, harga ekspor sawit Indonesia ke AS melonjak. Meski demikian, harga akhir produk Indonesia tetap kompetitif, berkisar antara USD 1.400 hingga USD 2.200 per ton, menunjukkan daya saing yang tetap terjaga meski dikenai tarif tinggi.

Namun, permasalahan yang terjadi bukan hanya soal harga, tarif tambahan tersebut menyebabkan penurunan kontribusi ekspor terhadap lembaga strategis nasional seperti BPDPKS. Ekspor ke AS pada 2024 menyumbang sekitar 5,42% dari total pendapatan BPDP atau setara Rp 1,4 triliun. Meskipun persentasenya kecil, angka ini sangat penting karena pengeluaran BPDP diperkirakan akan melonjak 72% pada 2025 seiring dengan program strategis seperti perluasan biodiesel (B40) dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Kondisi ini menandakan sebuah titik balik, di mana ketergantungan pada skema pendanaan berbasis ekspor mentah dengan struktur harga global yang rapuh terbukti tidak cukup tahan menghadapi tekanan kebijakan eksternal. Oleh karena itu, strategi Indonesia dalam menjaga keberlanjutan pendapatan BPDP harus mengalami transformasi.

Salah satu alternatif strategis adalah penguatan Bursa CPO Indonesia (ICDX) sebagai pusat perdagangan yang dapat menjadi acuan harga domestik. Dengan menjadi *price setter*, ICDX dapat menciptakan referensi harga yang lebih stabil dan independen dari fluktuasi pasar global yang seringkali tidak terduga. Hal ini juga memungkinkan Indonesia untuk

mengendalikan volatilitas harga dan menjaga pendapatan BPDP lebih konsisten.

Selain itu, diversifikasi sumber bahan baku biodiesel menjadi sebuah keharusan strategis. Selama ini, ketergantungan besar pada CPO sebagai bahan baku utama biodiesel menyebabkan tekanan harga yang tinggi, sehingga menaikkan biaya subsidi yang harus ditanggung oleh BPDP. Untuk itu, pengembangan bahan baku alternatif seperti *Used Cooking Oil* (UCO), *Palm Oil Mill Effluent* (POME), *jatropha*, serta berbagai minyak nabati lainnya perlu diperkuat.

Diversifikasi ini dapat mengurangi tekanan kenaikan harga CPO yang selama ini menambah beban subsidi BPDP dalam membiayai selisih harga biodiesel.

Hilirisasi industri sawit pun harus didorong secara serius dengan dukungan kebijakan yang konkret dan terintegrasi. Hilirisasi tidak hanya berarti mengolah CPO menjadi produk turunan dengan nilai tambah seperti biodiesel, oleokimia, dan produk makanan olahan, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut didukung oleh regulasi dan insentif yang memadai, termasuk

penguatan pasar ekspor produk hilir. Paket kebijakan ekspor yang menguntungkan akan mendorong pertumbuhan industri hilir dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang rentan terhadap perubahan tarif dan proteksionisme global.

Reformasi formula Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel juga merupakan langkah krusial untuk menyelesaikan masalah biaya subsidi yang membebani BPDP. Formula saat ini yang masih mengacu pada harga pasar lokal sering kali tidak mencerminkan kondisi pasar domestik yang sebenarnya, juga terkesan tidak sejalan dengan keberadaan minyak lain yang dapat mensubstitusi CPO sebagai *feedstock* biodiesel. Oleh sebab itu, revisi formula HIP yang lebih adil dan realistis diperlukan agar program biodiesel bisa berjalan secara berkelanjutan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Secara keseluruhan, strategi ini menuntut penguatan internal yang signifikan agar industri sawit nasional mampu menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat. Dengan perpaduan strategis, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai pemimpin pasar sawit global yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. (MA)



Tata Kelola UCO: Mencegah Jelantah Lari ke Luar Negeri

Minyak jelantah atau *Used Cooking Oil* (UCO), yang selama ini dianggap limbah dari hasil penggorengan, ternyata memiliki nilai strategis sebagai sumber energi terbarukan. Di Indonesia, konsumsi minyak goreng mencapai 8,3 juta kiloliter per tahun, sehingga diperkirakan dapat menghasilkan 3,6 juta kiloliter UCO per tahun (3,13 juta ton)—angka yang cukup besar untuk menopang sebagian kebutuhan *renewable energy* nasional. Namun masalahnya, siapakah yang lebih menikmati potensi ini?

Berdasarkan survey IPOSS, diketahui hanya sekitar 640 ribu kL yang berpotensi dapat dikumpulkan dalam setahun. Hal ini dilatarbelakangi dari minimnya kegiatan pengumpulan di masyarakat, persepsi tentang penggunaan minyak goreng berulang dan tiadanya insentif yang memadai. Karenanya, pengumpulan UCO masih terbilang rendah dibandingkan potensi yang tersedia (<20%). Ironisnya, mayoritas UCO yang berhasil dikumpulkan justru hampir seluruhnya diekspor ke luar negeri.

Bukan berarti para pengumpul lebih berorientasi pada pasar luar, melainkan karena ketiadaan pasar dalam negeri yang mampu menyerap UCO sebagaimana negara Eropa dan Asia Timur, yang menjadikan UCO sebagai bagian dari sistem energi nasional. Di dalam negeri, UCO lebih sering digunakan untuk pembuatan lilin, sabun, ataupun beberapa produk kreatif seperti batik. Demikian pula biodiesel, namun permintaannya masih terbatas dan bersifat sporadis. Akhirnya, harga UCO di dalam negeri masih rendah dan tidak semenarik harga ekspor.

Akibatnya, terjadi ketimpangan daya saing antara pasar ekspor dan domestik yang mencolok, terutama karena faktor harga lebih tinggi, kontrak jangka panjang, serta skema pembayaran yang menjanjikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor UCO Indonesia meningkat hampir lima kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan yang nyata mulai terjadi sejak tahun 2019 dengan negara-negara Eropa dan Asia Timur sebagai tujuan utama.

Tingginya ekspor tidak terlepas dari diakuinya UCO sebagai bahan baku biofuel rendah emisi oleh *Renewable Energy Directive* (RED II) Uni Eropa (EU) dan *International Civil Aviation Organization* (ICAO), sehingga perannya dalam pencapaian target iklim semakin penting sebagai substitusi bahan bakar diesel dan avtur dari minyak bumi. UE bahkan memberikan insentif terhadap bahan bakar berbasis limbah ini sesuai dengan skema *carbon offset*. Menurut RED II, *default* emisi yang dapat dikurangi dari penggunaan UCO sebesar 84%. Artinya, jika dikonversi menjadi biodiesel

maka dapat menghemat emisi sebesar 2,25 kg setara CO₂ (kgCO₂e) per liternya (asumsinya 1 liter diesel dapat melepaskan emisi sebesar 2,68 kgCO₂e).

Jika skema insentif berdasarkan *carbon offset* ini diterapkan di Indonesia, tentu akan sangat menarik. Sebab, jika seluruh potensi UCO di Indonesia dikonversi menjadi biodiesel—maka dapat menghasilkan 3,4 juta kL per tahun yang menghemat emisi sebesar 7,7 juta ton setara CO₂ (tCO₂e). Jauh lebih besar penghematannya dibandingkan penggunaan biodiesel dari *Crude Palm Oil* (CPO) yang secara *default* hanya diakui menghemat 19% (RED II).

Namun sayangnya, dalam kerangka program mandatori biodiesel, UCO belum diakui pemerintah sebagai bahan baku resmi. Menteri ESDM dalam menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel, hanya mengacu pada harga CPO. Artinya, dalam membiayai program biodiesel, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hanya membiayai pembelian CPO sebagai bahan baku biodiesel dan tidak bahan baku lainnya seperti UCO.

Tidak masuknya UCO dalam skema insentif biodiesel sebagaimana yang dinikmati CPO, tentunya berdampak pada lesunya penyerapan UCO untuk biodiesel di dalam negeri. Hal inilah yang menyebabkan UCO lebih banyak diekspor.

Ke depan, dalam rangka memaksimalkan peran UCO di dalam negeri, pemerintah perlu membuka ruang bagi bahan baku ini untuk ikut memenuhi kebutuhan biodiesel nasional. Perlunya revisi kebijakan dalam penetapan HIP biodiesel sehingga harga UCO dalam negeri dapat lebih kompetitif, sehingga tidak hanya Eropa yang menikmati energi bersih karena UCO, tetapi Indonesia pun dapat melangkah lebih jauh dalam menghasilkan energi bersih dari limbahnya sendiri. (SN)





Research

Indonesia sebagai Raja SAF Global: Mimpi atau Misi?

Sustainable Aviation Fuel (SAF) kian menjadi perhatian utama dalam upaya global mengurangi emisi di sektor penerbangan, salah satu sektor paling sulit didekarbonisasi karena ketergantungan pada bahan bakar cair berenergi tinggi. Dalam *Conference of the Parties* ke-29 (COP29) di Baku November yang lalu, isu SAF mendapat sorotan khusus. Termasuk seruan mempercepat transisi energi bersih melalui kolaborasi dan skema pembiayaan global. Indonesia, sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, sebenarnya menyimpan potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam industri SAF global. Namun, kesiapan industri sawit nasional menjadi pertanyaan penting: siapkah industri sawit kita menjalankan peran ini secara berkelanjutan dan membawa Indonesia memimpin di panggung SAF dunia?

Potensi Indonesia tak hanya terlihat dari tingginya volume produksi *Crude Palm Oil* (CPO) yakni sekitar 50 juta ton per tahun, tetapi juga dari keberagaman bahan baku yang tersebar di seluruh rantai pasok industri sawit. Produk utama seperti CPO, produk sampingan seperti *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD) dan gliserol, serta limbah seperti *Palm Oil Mill Effluent* (POME), minyak jelantah atau *Used Cooking Oil* (UCO), dan biomassa sawit (tandan kosong, fiber, batang, hingga pelepah) menciptakan ekosistem pasokan yang sangat luas. Total potensi bahan baku ini diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta ton per tahun (IPOSS, 2025). Bahan-bahan ini dapat dikonversi menjadi SAF melalui jalur teknologi yang telah diakui *American Society for Testing and Materials* (ASTM) *International*, seperti *Hydroprocessed Esters and Fatty Acids* (HEFA), *Alcohol-to-Jet* (ATJ), dan *Fischer-Tropsch* (FT), masing-masing memiliki keunggulan teknis dan kesiapan komersial berbeda.

Beberapa bahan bahkan telah memenuhi standar keberlanjutan *International Civil Aviation Organization* (ICAO) dalam skema *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation* (CORSIA). PFAD dan UCO, misalnya, memiliki nilai emisi *default*, atau intensitas emisi yang rendah dan tidak dikenakan faktor *Induced Land Use Change* (ILUC). Saat ini, POME juga tengah diajukan ke ICAO untuk mendapatkan nilai emisi *default*, sehingga dapat masuk

pasar SAF global secara formal. Di sisi domestik, inisiatif telah dimulai, antara lain uji coba produksi SAF dari *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Kernel Oil* (RBDPKO) melalui metode Co-HEFA di kilang Cilacap oleh Pertamina, dan sudah ada investor yang melirik Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatera Utara sebagai sentra investasi industri SAF berbasis sawit.

Namun, jalannya tidak tanpa hambatan. Tantangan keberlanjutan muncul bila bahan baku utama seperti CPO digunakan tanpa sistem *methane capture*, karena nilai emisinya mencapai 99,1 gCO₂e/MJ (gram karbon dioksida ekuivalen per megajoule energi). Nilai ini melebihi ambang batas CORSIA sebesar 89 gCO₂e/MJ. Sebaliknya, limbah seperti POME dan UCO lebih menjanjikan karena nilainya bisa jauh lebih rendah dan tidak memicu konversi lahan. Tantangan lain mencakup kebutuhan investasi awal yang tinggi, regulasi nasional yang belum sepenuhnya mendukung, serta kurangnya skema insentif hijau yang menarik bagi pelaku industri.

Dengan sumber daya alam melimpah, infrastruktur industri yang berkembang, dan meningkatnya permintaan global terhadap SAF, yang diperkirakan tumbuh 26% per tahun (Transparency Market Research, 2024), Indonesia sesungguhnya berada dalam posisi strategis.

Kini, yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan, skema insentif pembiayaan yang lebih progresif, sinergi antar pemangku kepentingan, investasi di teknologi rendah emisi, dan penguatan diplomasi dan riset untuk memperjuangkan nilai emisi *default* ke ICAO yang lebih berkeadilan.

Dengan potensi sumber daya yang melimpah dan perhatian global yang semakin besar terhadap dekarbonisasi sektor penerbangan, Indonesia berada di titik strategis untuk menentukan arah masa depan industrinya, apakah akan sekadar menjadi pemasok bahan baku, atau justru mengambil peran sebagai produsen utama SAF dunia. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia bisa, tetapi apakah kita siap menjadikan SAF sebagai bagian dari misi nasional, bukan sekadar mimpi yang tertunda? (RFY)

“Emas Coklat” dari Limbah Sawit: Potensi POME sebagai Bahan Bakar Rendah Emisi untuk Penerbangan

Bisnis kelapa sawit Indonesia diproyeksikan makin menjanjikan berkat hadirnya *Palm Oil Mill Effluent* (POME) sebagai bahan baku utama dalam produksi *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) dunia. POME, dulunya dianggap limbah cair tanpa nilai, kini mulai dipandang sebagai “emas coklat” karena bisa menghasilkan minyak bernilai tinggi. POME yang dahulu hanya digunakan sebagai pupuk organik atau pakan ternak, kini minyak dari POME bisa diolah menjadi bahan bakar penerbangan yang jauh lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan. Negara-negara seperti China, Malaysia, dan kawasan Eropa mulai melirik potensi ini dengan mengimpor minyak POME dari Indonesia.

Selain meningkatkan nilai tambah limbah industri, pemanfaatan POME sebagai bahan bakar nabati turut mendukung agenda transisi energi bersih. Pengolahan minyak dari POME dapat menekan emisi gas rumah kaca secara signifikan, baik dari pengurangan emisi metana (CH_4) yang dihasilkan di kolam limbah, maupun dari peranannya sebagai substitusi bahan bakar fosil. Metana diketahui memiliki efek pemanasan global 25 kali lebih kuat dibanding CO_2 , sehingga ekstraksi minyak dari limbah ini memiliki dampak iklim yang signifikan.

Teknologi konversi minyak dan lipid menjadi bioavtur telah distandarkan melalui ASTM D7566 Annex 2 dengan metode HEFA (*Hydroprocessed Esters and Fatty Acids*), yang kini menjadi teknologi paling mapan dan ekonomis untuk memproduksi SAF, termasuk limbah industri seperti minyak POME. Ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Indonesia untuk memasuki pasar SAF global dengan produk yang berasal dari sumber daya berkelanjutan.

Menurut *International Civil Aviation Organization* (ICAO), SAF dikatakan berkelanjutan bila memiliki emisi minimal 10% lebih rendah dibandingkan bahan bakar jet konvensional, yang rata-rata sebesar 89 $\text{gCO}_2\text{e/MJ}$. Emisi dihitung dari

penilaian *Life Cycle Assessment* (LCA) ditambah potensi perubahan penggunaan lahan (ILUC).

Mengingat POME dikategorikan sebagai residu dalam positive list bahan baku SAF oleh ICAO, maka tidak memiliki nilai ILUC (*Induced Land Use Change*). Dengan demikian, perhitungan emisi SAF dari POME hanya didasarkan pada core LCA, yang nilai emisinya dapat dianggap sebanding dengan *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD), yaitu 20,7 $\text{gCO}_2\text{e/MJ}$ (gram karbon dioksida ekuivalen per megajoule energi). Artinya, penggunaan SAF dari POME dapat menghemat emisi karbon hingga 76% jika digunakan penuh menggantikan *jet fuel* konvensional.

Potensi ketersediaan POME di Indonesia sangat melimpah. Saat ini terdapat sekitar 1.386 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas olah sekitar 60 ribu ton TBS per jam. Jumlah Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah per tahun diperkirakan sekitar 250 juta ton. Dengan kandungan minyak dalam POME sebesar 0,35–0,87% dari volume TBS, maka potensi minyak yang dapat diekstraksi dari POME mencapai minimal 875 ribu ton per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 704 ribu kiloliter SAF yang dapat dihasilkan.

Berdasarkan Peta Jalan SAF Indonesia (Kemenko Maritim dan Investasi, 2024), kebutuhan SAF domestik 2030 ditargetkan sebesar 2,5% dari total konsumsi bahan bakar avtur, atau setara dengan 156 ribu kiloliter. Untuk mencapainya, dibutuhkan sekitar 194 ribu ton minyak POME. Angka ini sangat realistis jika melihat potensi ketersediaan nasional.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, insentif investasi, serta kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat memanfaatkan POME sebagai sumber energi bersih yang strategis. Tidak hanya memperkuat posisi sebagai penghasil sawit terbesar, tetapi juga mendorong Indonesia menjadi pemain utama dalam pasar SAF global—sebuah langkah nyata menuju ekonomi hijau dan target emisi netral karbon. (DS)



Dilema Pungutan Ekspor terhadap Pengembangan Energi Hijau



Kebijakan pungutan ekspor yang baru-baru ini ditetapkan pemerintah melalui PMK No. 30 Tahun 2025 menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemanfaatan limbah kelapa sawit. Meskipun bertujuan mengoptimalkan dana untuk program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), kebijakan ini berpotensi menghambat pengembangan energi hijau berbasis limbah yang telah diakui secara internasional. Bagaimana solusinya?

Per tanggal 14 Mei 2025, kenaikan tarif Pungutan Ekspor (PE) berdasarkan PMK No. 30 Tahun 2025 untuk produk kelapa sawit dan turunannya resmi diberlakukan. Tarif PE untuk *Crude Palm Oil* (CPO) dinaikkan dari 7,5% menjadi 10% dari harga referensi. Selain itu, kebijakan ini juga menaikkan tarif PE untuk 33 jenis produk lainnya, termasuk limbah seperti *Used Cooking Oil* (UCO), minyak dari *Palm Oil Mill Effluent* (POME), dan *High Acid Palm Oil Residue* (HAPOR), yang kini dikenakan tarif yang sama dengan CPO, sebesar 10%.

Sebagaimana diketahui, tujuan utama kebijakan ini adalah menghimpun dana bagi BPDP untuk membiayai berbagai program strategis sawit, terutama biodiesel dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dari industri sawit untuk industri sawit. Mandatori biodiesel terus meningkat hingga B40 dan terbukti efektif menyerap CPO, menekan stok global, serta menjaga harga sawit. Dampak positifnya harga TBS petani menjadi lebih baik.

Dinaikannya tarif PE memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan biaya BPDP yang besar yang mencapai lebih dari Rp 40 triliun per tahun. Namun, ketika tarif PE diperluas hingga menyamakan produk limbah dengan CPO, maka kebijakan tersebut telah menimbulkan beban tambahan bagi pelaku ekspor limbah.

Kebijakan ini juga seakan bertentangan dengan semangat pemanfaatan limbah dalam transisi energi terbarukan, sebab produk limbah yang seharusnya mendapat insentif, justru dibebani pungutan besar. Uni Eropa sudah menerapkan skema *carbon offset* dalam pemanfaatan biofuel berbasis

UCO dan minyak POME dengan pengurangan emisi karbon mencapai lebih dari 80% sehingga ada insentif yang disediakan.

Penyamaraan tarif ini dilakukan pemerintah sebagai respon terhadap dugaan pencampuran ilegal antara limbah dan CPO yang mungkin dilakukan sebagian pelaku eksportir. Namun, bukannya melakukan investigasi yang memadai, pemerintah justru mengambil langkah mengenakan pungutan yang sama untuk semuanya.

Padahal, jika pemerintah mengembangkan sistem digital *traceability* yang handal, identifikasi asal-usul limbah dapat dilakukan secara akurat. Atas dasar itu, produk limbah yang terbukti berasal dari kolam limbah PKS ataupun bekas penggunaan minyak goreng dapat diberikan tarif PE yang berbeda dengan CPO.

Tumbuhnya ekosistem ekspor UCO dan POME di Indonesia tidak terlepas dari permintaan pasar Uni Eropa yang telah terbentuk. Sementara di dalam negeri, permintaan sejenis belum terbentuk akibat kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri energi hijau berbasis limbah.

Oleh karena itu, sebaiknya perlu perbaikan tata kelola UCO dan POME, dengan tidak membatasi ekspor sebelum pasar domestik tumbuh. Kebijakan ini penting agar limbah tidak menumpuk dan menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan, serta agar pelaku usaha tetap memiliki ruang gerak yang cukup dalam menyerap tenaga kerja informal.

Dengan adanya dukungan kebijakan yang tepat, proses perizinan yang efisien, dan penerapan teknologi *traceability digital* yang transparan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong lahirnya industri energi hijau berbasis limbah kelapa sawit. Langkah ini tidak hanya akan mendukung transisi energi nasional, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam membangun ekonomi hijau yang berkelanjutan. (DHP)

Membangun Sistem Ketertelusuran UCO yang Kredibel



Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah adalah limbah hasil penggorengan dari rumah tangga, Horeka (hotel, restoran, kafe), dan industri makanan. UCO kini semakin diminati di pasar global setelah diakui sebagai bahan baku *advanced biofuel* oleh Uni Eropa melalui kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED). Menurut data *trademap.org*, negara-negara Uni Eropa menyerap 5 jutaan ton UCO per tahun, dengan Belanda, Spanyol, Jerman, dan Belgia sebagai importir utama.

Tingginya permintaan tersebut memberikan peluang ekonomi baru yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia, masyarakat Indonesia dikenal sebagai salah satu konsumen minyak goreng terbesar dunia. Badan Pangan Nasional, pada tahun 2023, menyebutkan rata-rata konsumsi minyak goreng masyarakat Indonesia adalah sekitar 9,56 kilogram per kapita per tahun.

Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), alokasi minyak sawit untuk oleopangan mencapai 10,3 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 8,3 juta ton berupa minyak goreng diserap oleh pasar domestik, terutama rumah tangga, Horeka, dan industri makanan. Jika diasumsikan sisa minyak dari penggorengan dapat mencapai 40%, maka ada sekitar 3,3 juta ton per tahun UCO tersedia.

Sayangnya, dari potensi besar tersebut, ekspor UCO Indonesia masih rendah, hanya sekitar 300 ribu ton per tahun, atau 4–6% dari demand Uni Eropa. Berdasarkan hasil riset, sebagian besar masyarakat Indonesia (80%) belum terbiasa melakukan pengumpulan UCO. Sehingga UCO masih banyak digunakan kembali untuk memasak hingga tidak bersisa atau dibuang.

Salah satu penyebab minimnya pengumpulan UCO adalah belum adanya rantai pasok yang kredibel, minimnya insentif, serta ketiadaan regulasi yang mendorong industri menyerahkan limbah minyak ke pengepul resmi. Selain itu,

sistem pelaporan dan pencatatan UCO oleh pelaku Horeka dan industri makanan juga belum tersedia.

Di lapangan, pengumpulan UCO dilakukan oleh pengepul kecil dan agen lokal, kemudian dijual ke eksportir. Namun, laporan investigatif internasional mengungkap adanya potensi penipuan label UCO, termasuk dari Indonesia, yang membuat negara importir memperketat verifikasi asal-usul. Kondisi ini turut mengancam reputasi Indonesia dan menurunkan kepercayaan pasar internasional terhadap klaim UCO asal Indonesia sebagai limbah berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan ini, Indonesia perlu segera membangun sistem ketertelusuran UCO yang kredibel untuk memastikan bahwa UCO benar-benar berasal dari limbah penggorengan, bukan minyak baru atau limbah industri lain. Meskipun sertifikasi internasional seperti ISCC (*International Sustainability and Carbon Certification*) dapat dijadikan rujukan, namun implementasinya masih terbatas dan belum menyentuh pelaku hulu seperti pengepul kecil.

Maka, sistem regulasi nasional perlu di bangun, dikembangkan dan diperkuat melalui:

- Registrasi seluruh pelaku usaha dalam sistem OSS dengan KBLI 38110, dan diverifikasi serta didaftarkan dalam sistem rantai pasok.
- Digitalisasi rantai pasok,
- Audit berkala oleh lembaga independen,
- Keterlibatan pemerintah daerah dan asosiasi lokal,
- Skema insentif bagi pelaku patuh dan sanksi bagi pelanggar.

Di tengah meningkatnya permintaan biofuel dan sorotan global atas praktik curang, Indonesia perlu mengambil kebijakan untuk segera membangun sistem ketertelusuran UCO yang kredibel guna menjaga kepercayaan pasar, memperluas ekspor, meningkatkan pengumpulan, dan mendukung transisi energi bersih.

Dengan komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan pengumpulan dan nilai tambah UCO, tetapi juga berpotensi menjadi pemimpin global dalam green energy dan tata kelola limbah berkelanjutan. (DHP)



Pembina: **Sofyan Djalil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**,
Pemred: **M. Aji Surya**, Redaktur: **Dimas HP**
Staf Redaksi: **Dwivayani, Faridl, Raisya, Aura, Sylvia, Jennifer**
Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id